



Penguatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Bagi Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Irwansyah

Faculty of Economics and Business, University of Bengkulu

Tlp. 081272038789

Email: irwansyah@unib.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-04-17

Revised : 2025-05-17

Accepted: 2025-05-19

KEYWORD

BUMDes,
financial management,
basic accounting,
financial training.

KATA KUNCI

BUMDes,
pengelolaan keuangan,
akuntansi dasar,
pelatihan keuangan.

ABSTRACT

The community service activity aimed to enhance the financial management capacity of the administrators/managers of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sri Kuncoro Village, Pondok Kelapa District, Central Bengkulu Regency, as well as the preparation of financial reports, such as income statements, balance sheets, and cash flow statements. The methods used included mentoring, training, and simulations in the field of Basic Accounting, with 12 participants who were the administrators/managers of BUMDes, conducted at the office of Sri Kuncoro Village. As a result, the participants were able to improve their ability to manage BUMDes finances more efficiently, accountably, and in accordance with applicable accounting standards. This activity was expected to support the sustainability of BUMDes operations and strengthen the role of BUMDes in empowering the village economy. The training also raised awareness of the importance of transparency in financial management, which could enhance public trust in BUMDes.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, serta penyusunan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Metode yang digunakan adalah pendampingan, pelatihan, dan simulasi di bidang Akuntansi Dasar, pesertanya merupakan pengurus/pengelola BUMDes sebanyak 12 orang, dilaksanakan di kantor Desa Sri Kuncoro. Hasilnya, peserta mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan BUMDes dengan lebih efisien, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha BUMDes dan memperkuat peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi desa. Pelatihan ini juga membangun kesadaran mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peranan yang sangat vital dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Sebagai entitas yang dikelola oleh masyarakat setempat, BUMDes berfungsi secara strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di desa melalui pengelolaan usaha yang bersifat mandiri. Banyak BUMDes yang menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan kurangnya kapasitas dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel. Permasalahan ini kerap kali disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan keterampilan para pengurus dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik. Akibatnya, hal ini berujung pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan yang dihasilkan (Mardiasmo, 2018; Rahardjo, 2020).

Desa Sri Kuncoro, yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pengelolaan keuangan BUMDes masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup serius. Beberapa diantaranya adalah belum optimalnya penerapan sistem akuntansi yang terstruktur dan minimnya pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keuangan yang baik di kalangan para pengurus. Situasi ini dapat menghambat potensi BUMDes untuk berfungsi secara maksimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, sehingga perlu adanya perhatian lebih dalam hal ini.

Kegiatan pengabdian yang kami laksanakan bertujuan untuk memberikan pelatihan serta meningkatkan kapasitas para pengurus atau pengelola BUMDes Desa Sri Kuncoro dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Diharapkan, pelatihan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya laporan keuangan yang akurat sebagai alat evaluasi kinerja BUMDes. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh BUMDes.

Signifikansi dari penguatan kapasitas ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga berpotensi mendorong para pengelola BUMDes untuk lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan terkait investasi dan operasional yang berkelanjutan. Sebagai langkah awal yang krusial, penting untuk menciptakan sistem akuntansi yang jelas dan terstruktur, yang dapat memudahkan dalam pencatatan transaksi keuangan serta penyusunan laporan yang transparan.

Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes (Bastian, 2017; Kurniawan, 2019).

Kajian ini dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diberikan dapat berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Sri Kuncoro. Tujuan akhir dari kajian ini adalah untuk meningkatkan kinerja ekonomi BUMDes agar lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat desa. Melalui upaya ini, diharapkan BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Kehadiran BUMDes diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Namun BUMDes yang berada di Desa Sri Kuncoro belum mampu menggerakkan Ekonomi Desa dilihat dari faktor pemahaman dari sumber daya manusia mengenai kelembagaan BUMDes. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang BUMDes membuat kurang majunya sebuah desa dan tidak meningkatkan perekonomian desa. Selanjutnya belum optimalnya komitmen aparat dalam menjalankan tupoksi dan regulasi. Hal ini membuat terhambatnya pelaksanaan BUMDes. Kemudian belum adanya kegiatan pelatihan, pendampingan evaluasi dan pemantauan BUMDes sehingga berakibat kurangnya peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mampu meningkatkan daya saing desanya secara mandiri.

Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa Sri Kuncoro, Tim dapat memberikan masukan berharga tentang pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Ini mencakup aspek keuangan, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

Dengan demikian, PPM di Desa Sri Kuncoro bukan hanya menjadi wadah bagi masyarakat dan Tim PPM untuk mengasah keterampilan praktis, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan lokal. Integrasi keilmuan akuntansi dengan potensi alam dan pembaharuan peraturan desa di Desa Sri Kuncoro dapat menjadi model yang inspiratif dan berdampak jangka panjang dalam meningkatkan

kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut.

2. Tinjauan Literatur

Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan bagi para pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini semakin menjadi fokus perhatian utama di Indonesia. Hal ini disebabkan karena BUMDes memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian di tingkat desa. Dalam konteks ini, upaya untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan yang lebih mandiri, transparan, dan efektif menjadi sangat penting. Pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik menjadi suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan keuangan yang efisien, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan serta keberlanjutan usaha mereka (Sudrajat, 2021; Mulyani, 2020).

a. Konsep Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pengelolaan keuangan yang efektif dalam BUMDes sangat bergantung pada penerapan sistem akuntansi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Astuti & Yulianto (2016), keberhasilan BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa sangat dipengaruhi oleh adanya sistem akuntansi yang jelas dan terstruktur. Sistem ini memungkinkan pengelola untuk melakukan pemantauan aliran dana, pengeluaran, dan pendapatan dengan lebih efisien. Sebaliknya, sistem yang tidak memadai atau pengelolaan yang kurang baik dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi kredibilitas BUMDes di mata masyarakat serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan (Mardiasmo, 2018).

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang baik di tingkat desa masih menjadi tantangan yang signifikan, terutama bagi para pengurus yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Penelitian oleh Rahardjo (2020) mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengelolaan keuangan BUMDes adalah kurangnya pelatihan yang memadai bagi pengurus dan pengelola mengenai akuntansi desa. Para pengurus yang tidak terampil dalam pengelolaan keuangan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip

transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan kunci untuk pengelolaan dana yang efektif.

b. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan BUMDes

Sebagian besar penelitian yang ada menunjukkan bahwa penguatan kapasitas melalui pelatihan akuntansi dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan BUMDes. Pelatihan tersebut tidak hanya penting untuk meningkatkan pengetahuan dasar mengenai akuntansi, tetapi juga untuk membekali para pengelola BUMDes dengan keterampilan yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam konteks ini, pengelola perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang cara menyusun laporan laba rugi, neraca, dan arus kas yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kurniawan, 2021).

Namun, meskipun pelatihan-pelatihan tersebut memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas ini belum sepenuhnya berhasil jika tidak disertai dengan penerapan sistem akuntansi yang tepat serta dukungan teknologi yang memadai (Sari, 2022). Sebagai contoh, penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk pencatatan transaksi keuangan dapat membantu meminimalkan kesalahan manual serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan (Sutrisno, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2021) menunjukkan bahwa desa-desa yang telah mengadopsi sistem akuntansi berbasis teknologi memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dalam laporan keuangan mereka.

c. Hubungan Pengelolaan Keuangan dan Keberlanjutan BUMDes

Berdasarkan berbagai kajian yang ada, tampak jelas bahwa pengelolaan keuangan yang baik memiliki hubungan yang erat dengan keberlanjutan BUMDes. Desa yang memiliki sistem akuntansi yang baik akan lebih mudah dalam mengakses sumber daya eksternal, seperti dana bantuan dari pemerintah, karena mereka memiliki catatan keuangan yang jelas dan terperinci. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes tidak hanya memperkuat posisi internal BUMDes, tetapi juga membuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung pengembangan ekonomi desa.

Namun, meskipun ada hubungan positif antara pengelolaan keuangan yang baik dan keberlanjutan BUMDes, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa banyak BUMDes yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan kinerja mereka dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang kurang efektif dalam aspek operasional dan pengelolaan sumber daya manusia (Sari, 2022). Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola BUMDes tidak hanya penting dari sudut pandang akuntansi, tetapi juga dalam hal manajerial dan operasional.

Upaya mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, penting bagi BUMDes untuk mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan keuangan, akuntansi, dan manajemen secara holistik. Ini akan memastikan bahwa BUMDes tidak hanya mampu bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa dalam jangka panjang.

3. Metode

Khalayak sasaran dalam melakukan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Pengurus/Pengelola BUMDes Di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan pada 22 Oktober 2024 bertempat di kantor Desa Sri Kuncoro, dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang. Mitra kegiatan ini adalah Desa Binaan Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah pendampingan, pelatihan, dan simulasi di bidang Akuntansi Dasar. Pendampingan ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada para pengelola BUMDes bahwa perlunya kapasitas Pengelolaan keuangan BUMDes.

Kegiatan pengabdian ini juga dilakukan dengan bentuk kegiatan berupa pembimbingan pengelolaan keuangan, simulasi dan dialog interaktif. Model ini digunakan agar masyarakat sasaran tidak merasa digurui sehingga hasilnya diharapkan lebih efektif. Sebagai khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah pengurus/pengelola BUMDes dan perangkat Desa di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. di daerah tersebut perlu mendapatkan informasi dan bimbingan Akuntansi dasar mengenai pengelolaan Keuangan BUMDes.

4. Hasil

a. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bagi Kelompok Sasaran

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan sangat baik, berhasil menyentuh banyak aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Sri Kuncoro. Respons yang positif dari para peserta menandakan bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam mengenai hasil yang tercapai:

1) Peningkatan Pemahaman

Sebagian besar pengurus/ pengelola BUMDes yang ikut serta dalam kegiatan pengabdian ini melaporkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai pentingnya pengetahuan akuntansi dasar dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Mereka menyadari bahwa akuntansi dasar lebih dari sekadar kewajiban administratif, melainkan suatu keharusan yang dapat memberikan banyak manfaat praktis.

Sebagai contoh, pengelola BUMDes sebelumnya belum sepenuhnya menyadari bahwa pengetahuan akuntansi dasar dalam pengelolaan keuangan BUMDes bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kredibilitas di mata masyarakat dan pihak luar seperti investor atau lembaga pendukung keuangan. Hal ini membuka pemahaman bahwa dengan memiliki pengelolaan keuangan yang baik, BUMDes bisa mengakses berbagai jenis bantuan dan dana pengembangan dari pemerintah atau lembaga swasta yang selama ini belum dapat dijangkau.

Selain itu, para peserta juga mulai memahami bahwa pengetahuan akuntansi dasar memberikan bukti pembukuan atau pengelolaan keuangan bagi pengelola dan anggota BUMDes, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi masalah yang dapat mengganggu keberlanjutan operasional BUMDes. Mereka lebih yakin untuk melakukan kegiatan usaha dalam skala yang lebih besar, karena memiliki landasan yang kuat untuk mendukung operasional dan pengelolaan sumber daya desa.

2) Dokumen pembukuan yang Diperoleh

Salah satu hasil penting yang tercapai adalah beberapa pengelola BUMDes mulai mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk memperoleh dokumen pembukuan yang diperlukan. Melalui pendampingan yang dilakukan selama kegiatan, pengelola BUMDes dibimbing untuk memulai proses pembuatan pembukuan dan dokumen keuangan.

Lebih lanjut, beberapa pengelola BUMDes juga mulai menyusun rencana untuk memperoleh perizinan terkait usaha yang mereka kelola, sehingga kegiatan mereka akan lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tentu saja menjadi langkah awal yang sangat baik untuk memperkuat posisi BUMDes dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

5. Diskusi

Selain peningkatan pemahaman mengenai aspek keuangan (akuntansi dasar), kegiatan ini juga memberikan ruang untuk diskusi dan kolaborasi yang lebih intens antara pengelola BUMDes dan masyarakat setempat. Dalam sesi diskusi kelompok, para pengelola BUMDes berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola usaha desa, serta mencari solusi bersama untuk mengatasinya.

Melalui diskusi ini, muncul berbagai ide inovatif yang dapat memperkuat pengelolaan BUMDes ke depan. Masyarakat juga lebih sadar akan pentingnya bekerja sama dalam mendukung keberlanjutan usaha yang dikelola oleh BUMDes. Sebagai contoh, masyarakat mulai memahami bahwa kesuksesan BUMDes bukan hanya bergantung pada pengelola, tetapi juga pada partisipasi aktif mereka dalam mendukung produk atau layanan yang disediakan oleh BUMDes.

Diskusi ini juga mempertemukan pengelola BUMDes dengan berbagai pihak yang memiliki potensi untuk bekerja sama, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Hal ini membuka peluang baru bagi BUMDes untuk mengembangkan jaringan dan memperoleh dukungan yang lebih luas dalam upaya mengembangkan usaha desa yang lebih berkelanjutan.

Pengelola BUMDes juga mendapatkan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi oleh BUMDes lainnya, sehingga mereka dapat saling memberi dukungan dan belajar satu sama lain dalam menghadapi hambatan yang mungkin muncul. Kerja sama ini memperkuat semangat kolektif dalam pengelolaan BUMDes, sehingga diharapkan akan meningkatkan hasil yang dicapai oleh BUMDes tersebut dalam jangka panjang.

Berikut adalah materi pengabdian kepada masyarakat tentang "Penguatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Bagi Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah" yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus/p

pengelola mengenai pentingnya akuntansi dasar dalam pengelolaan keuangan BUMDes:

Materi Pelatihan

- 1) Pengenalan Akuntansi untuk BUMDes
 - a. Pengertian Akuntansi: Akuntansi adalah sistem pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga.
 - b. Peran Akuntansi dalam BUMDes: Menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan, serta memastikan penggunaan dana desa dilakukan secara efisien dan tepat.
- 2) Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi
 - a. Entitas Ekonomi: Setiap BUMDes harus dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pengurus dan masyarakat desa.
 - b. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (GAAP): Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip dasar, seperti kesatuan, konsistensi, dan objektivitas.
 - c. Transparansi dan Akuntabilitas: Keuangan yang dikelola dengan transparan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan pihak terkait.
- 3) Pencatatan Transaksi Keuangan
 - a. Jenis-jenis Transaksi Keuangan: Pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban.
 - b. Dokumentasi yang Diperlukan: Bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, dan nota sebagai dasar pencatatan dalam buku besar.
 - c. Sistem Pembukuan Sederhana: Penggunaan buku kas atau aplikasi akuntansi sederhana untuk mempermudah pencatatan transaksi.
- 4) Penyusunan Laporan Keuangan
 - a. Laporan Laba Rugi: Menyajikan pendapatan dan pengeluaran BUMDes dalam periode tertentu untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.
 - b. Neraca: Menyajikan posisi keuangan BUMDes, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu.
 - c. Laporan Arus Kas: Menginformasikan tentang aliran kas masuk dan keluar dalam periode tertentu.
- 5) Analisis Keuangan BUMDes
 - a. Evaluasi Kinerja Keuangan: Membantu pengelola BUMDes dalam menilai apakah pendapatan yang dihasilkan cukup untuk

menutupi biaya operasional dan apakah ada potensi peningkatan pendapatan.

- b. Pengelolaan Keuangan yang Efisien: Identifikasi pengeluaran yang tidak efisien dan langkah-langkah untuk mengurangi biaya operasional.

6. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi pengurus/pengelola BUMDes di Desa Sri Kuncoro melalui pelatihan akuntansi dasar telah memberikan dampak positif yang signifikan. Para peserta pelatihan, yang mayoritas belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, kini memiliki pemahaman dasar yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip akuntansi, teknik pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak terkait.

Melalui pembekalan pengetahuan tentang penyusunan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, pengurus BUMDes diharapkan dapat mengelola keuangan dengan lebih efisien dan akuntabel. Kegiatan ini tidak hanya membantu pengelola dalam memperbaiki sistem pencatatan keuangan, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMDes yang lebih berkelanjutan.

Meskipun pelatihan ini telah memberikan dasar yang kuat, diperlukan pendampingan lebih lanjut agar pengelola BUMDes dapat lebih mahir dalam menggunakan sistem akuntansi yang telah diajarkan. Pendampingan dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan implementasi yang tepat di lapangan.

Disarankan untuk memperkenalkan penggunaan aplikasi akuntansi sederhana atau berbasis teknologi bagi BUMDes agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mengurangi kesalahan manual dalam pencatatan transaksi.

Peningkatan Pelatihan Lanjutan: Pelatihan lanjutan terkait analisis laporan keuangan dan pengelolaan anggaran yang lebih mendalam sebaiknya diberikan, agar pengurus BUMDes dapat lebih memahami penggunaan laporan keuangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

7. Daftar Pustaka

- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). *Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. (Unpublished manuscript).
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi sektor publik dan pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Herlina, N. (2021). Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Desa*, 12(3).
- Kurniawan, A. (2019). *Manajemen keuangan desa*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kurniawan, A. (2021). *Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mardiasmo, M. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, S. (2020). Evaluasi pengelolaan keuangan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2).
- Rahardjo, B. (2020). *Akuntansi desa dan pengelolaan keuangan desa*. Surabaya: Penerbit Unesa.
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BUMDes di era digitalisasi. *Owner*, 6(3), 2921–2930. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870>
- Sudrajat, I. (2021). *Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan BUMDes*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sutrisno, E. (2020). *Manajemen keuangan berbasis teknologi untuk BUMDes*. Yogyakarta: Penerbit Andi.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).